

**PENERAPAN MODEL IFRS FOR SMES (SAK-ETAP)  
SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL KOPERASI  
TERHADAP LINGKUNGANNYA  
(PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SAK-ETAP UNTUK KPN  
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK)**

**Ninik Kurniasih, Sari Zawitri, Rika Irawati dan Yuli Ellisa**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak 78124

E-mail: kurniasih\_ninik@yahoo.com

**Abstract:** IFRS For SMEs (Small Medium Entities) or known as SAK ETAP is a new standard that inspiring the writers to the research title: Penerapan Model IFRS For SMEs (SAK ETAP) Sebagai Tanggung Jawab Sosial Koperasi Terhadap Lingkungannya. The problems are formulated as (1) The changes of PSAK 27 into IFRS For SMEs (2) The summering and publishing of KPN Polnep based on IFRS For SMEs (3) The KPN's responsibility to the social environment. It's concern to disclose and measurement of Asset, Liabilities, Earned and Expense. This the exploratory research method which is narrative and descriptive approach with the KPN Polnep is an object. The object should be reporting its financial based on IFRS for SMEs and increase the social responsibility to its environment as the output of research. The KPN Polnep as icons entities which using the IFRS for SMEs. As the results, in December 31, 2012, KPN Polnep had used the IFRS For SMEs on its financial statement, while some items are not full adopted on its IFRS For SMEs, such as (1) the IFRS For SMEs sentences isn't declared on its notes of financial statement. (2) The inventory had not measured by actual method. (3) in cash flow statement, KPN Polnep had no choosed the direct or indirect method (4) there is no disclose of tender project (5) KPN had not full adoption of IFRS For SMEs as the conclusion of this research. KPN Polnep is taking care of its social responsibility by using IFRS For SMEs as a new standard reporting, timely in SHU, timely in financial reporting publish. Advice for KPN Polnep are Changes the terminology of Balance Sheet into Financial Position Statement with fixed asset as the first portion than its current asset.

**Keywords:** *IFRS for SMEs, summering, reporting, social responsibility*

## **LATAR BELAKANG**

Tanggal 17 Juli 2009 yang lalu menjadi momen bersejarah atas diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) oleh Ikatan Akuntan Indonesia bagi para entitas dalam melaporkan hasil bisnis mereka. Tujuan diterbitkannya standar yang baru ini adalah untuk mempermudah perusahaan atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menyusun laporan keuangan mereka.

Munculnya kebijakan ini mengisyaratkan harapan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang merupakan 90% pelaku bisnis di Indonesia dapat melakukan perubahan sebagai entitas pelapor keuangan. Perubahan tersebut diikuti atau sejalan dengan diberlakukannya penerbitan standar yang baru yaitu IFRS (International Financial Reporting Standards) yang berlaku efektif 1 Januari 2012. Sementara SAK ETAP berlaku efektif 1 Januari 2011.

Entitas yang kemudian dapat disebut sebagai kelompok atau golongan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan dan entitas yang tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Kriteria yang dimaksud mengarah pada perusahaan kecil dan menengah seperti: UKM, Home Industri, PDAM, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Credit Union dan Koperasi.

Khusus untuk koperasi, bahwa pelaporan keuangan koperasi yang semula berbasis pada kebijakan PSAK 27 Tentang Akuntansi Koperasi telah dicabut karena IFRS menyebabkan standar keuangan yang berbasis industri sejalan dengan basis transaksi. Pemberlakuan PSAK yang berbasis IFRS terhadap entitas tanpa akuntabilitas publik, menyebabkan entitas sekelas koperasi akan berat menyusun dan menyajikan laporan keuangan menggunakan IFRS. Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tertanggal 20 Desember 2011 tentang pemberlakuan PSAK berbasis IFRS, maka entitas koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada standar yang baru. Kebijakan ini menguatkan koperasi menggunakan IFRS For SMEs termasuk jenis koperasi pegawai negeri (KPN).

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagaimana tujuannya adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Perubahan PSAK 27 menjadi IFRS For SMEs (SAK-ETAP) (2) Bagaimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi sesuai dengan IFRS For SMEs (SAK-ETAP) (3) Bagaimana tanggung jawab sosial koperasi dengan adanya perubahan model menjadi IFRS For SMEs (SAK-ETAP). Masalah dibatasi oleh: (1) IFRS For SMEs (SAK-ETAP) (2) Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan terhadap Asset, Kewajiban, Pendapatan dan Beban (3) Laporan Keuangan Koperasi berupa: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sisa Hasil Usaha,

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) Menggali nilai nilai budaya koperasi dalam meningkatkan tanggung jawab sosial kepada para anggota koperasi khususnya dan lingkungan pada umumnya. (2) Manfaat perubahan penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan koperasi dari PSAK 27 menjadi IFRS For SMEs (3) Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perubahan entitas lain sekelas usaha kecil dan menengah serta UKM atau koperasi koperasi yang lain agar mau melakukan perubahan (4) Sosialisasi IFRS For SMEs untuk usaha kecil dan menengah atau UKM dan koperasi koperasi. (5) Dengan adanya pendampingan dalam perubahan kebijakan yang baru, diharapkan KPN Polnep dapat menjadi contoh bagi entitas lain yang serupa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis riset eksploratorial yang bersifat deskriptif naratif. Penelitian eksploratorial adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini berbentuk studi kasus, sehingga penelitian terbatas pada satu objek tapi mendalam, dengan mengambil tempat pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Politeknik Negeri Pontianak. Pemilihan KPN Polnep sebagai tempat penelitian didasarkan bahwa KPN Polnep merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang lokasinya berada di wilayah kerja peneliti. Sehingga alasan lain yang dipilih adalah bahwa perubahan hendaknya dilakukan dari “rumah sendiri”.

Waktu Penelitian ini memerlukan waktu sekitar 6 bulan (Desember 2012 sampai Mei 2013) dengan data laporan keuangan koperasi minimal 2 tahun terakhir. Sedangkan data dikumpulkan dengan wawancara, studi literatur, dan studi

dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah Data primer dan data sekunder.

Teknik analisa data adalah langkah langkah diselesaikannya suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan teknik uji model, yaitu dengan membandingkan model lama dengan model baru untuk kemudian ditemukan persamaan maupun perbedaannya setelah itu dianalisis secara kualitatif. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis berupa Uji Model IFRS For SMEs atau SAK-ETAP, meliputi: (1) Pengakuan dan Pengukuran Asset, Kewajiban, Pendapatan dan Beban (2) Merekonstruksi laporan keuangan tahun 2012 tentang posisi keuangan, laporan SHU, Arus Kas, Perubahan Modal serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

## PENYAJIAN DATA

Tujuan laporan keuangan usaha kecil menengah atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yaitu menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari entitas yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat empat tujuan laporan keuangan bagi pengguna yang lebih luas yaitu: 1) Posisi Keuangan; 2) Kinerja; 3) Arus Kas; dan 4) Pertanggungjawaban Manajemen. Keempat tujuan laporan keuangan tersebut dapat dicapai apabila suatu entitas dapat melakukan Pengakuan, Pengukuran serta Pengungkapan. Kepatuhan terhadap pengakuan, pengukuran serta pengungkapan menandakan suatu entitas telah sesuai dengan standar yang berlaku, dalam hal ini IFRS For SMEs atau SAK ETAP. SAK ETAP mewajibkan penggunaan kebijakan akuntansi yang andal dan sesuai. Berikut ini masing-masing penjabaran terhadap kriteria bagaimana transaksi ekonomi diakui, diukur serta diungkapkan.

**Pengakuan** (*Recognition*) adalah proses input/pemasukan di dalam laporan keuangan suatu pos yang **memenuhi** definisi dari suatu *Aset, Liabilities, Income, serta expense*.

**Pengakuan Aset.** Suatu aset diakui di dalam laporan keuangan, ketika dimungkinkan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang akan mengalir ke entitas dan aset tersebut, dengan ciri mempunyai suatu biaya (*cost*) atau nilai (*value*) yang dapat diukur secara andal. Suatu aset tidak diakui atas pengeluaran yang terjadi, apabila tidak ada manfaat ekonomi dimasa yang akan datang yang akan mengalir ke entitas melampaui periode pelaporan yang berjalan. Transaksi semacam ini tentunya akan menimbulkan pengakuan terhadap beban. Sementara aset suatu aset kontingensi (*contingent asset*) harusnya tidak diakui sebagai suatu aset karena probabilitas arus masuk dari manfaat ekonomisnya tidak mencukupi. Konsekuensi yang harus ditanggung ketika terdapat arus masuk dari sumber daya ekonomis sebenarnya pasti, maka pos tersebut bukan merupakan suatu aset yang kontingensi, oleh karenanya harus diakui.

**Pengakuan Liabilitas.** Suatu liabilitas diakui apabila: 1) Entitas mempunyai kewajiban pada tanggal pelaporan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu; 2) Dimungkinkan bahwa entitas harus mentransfer sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam penyelesaiannya; 3) Jumlah yang diselesaikan dapat diukur secara andal. Suatu liabilitas dikatakan sebagai liabilitas kontingensi (*contingent liability*) adalah liabilitas yang mungkin atau kewajiban kini dari jumlah yang tidak pasti. Liabilitas kontingensi (*contingent liability*) tidak harus diakui sebagai liabilitas dengan pengecualian liabilitas kontingensi yang timbul dalam suatu kombinasi bisnis.

**Pengakuan Pendapatan (*income*).** Pengakuan pendapatan (*income*) secara langsung disebabkan oleh pengakuan dan pengukuran terhadap aset dan liabilitas. Penghasilan (*income*) diakui sebagai suatu peningkatan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang, yang ditimbulkan oleh suatu peningkatan terhadap aset atau

penurunan liabilitas, selain dari kontribusi pemilik.

**Pengakuan Beban (*cost*).** Pengakuan beban secara langsung disebabkan oleh pengakuan dan pengukuran terhadap aset dan liabilitas. Beban yang diakui atas penurunan manfaat ekonomis masa depan yang disebabkan oleh penurunan aset dan kenaikan liabilitas, selain kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai kontributor ekuitas.

**Pengukuran (*measurement*)** adalah proses penentuan jumlah moneter dari aset, liabilitas, penghasilan (*income*) dan beban (*expense*) yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Pada umumnya, ada tiga basis pengukuran yang digunakan dalam standar ini, yaitu biaya historis (*historical cost*), biaya yang diamortisasi (*amortized cost*) dan nilai wajar (*fair value*). Biaya historis (*historical cost*) ditentukan oleh suatu aset, sebagai jumlah dari kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari jumlah yang dikeluarkan untuk mengakuisisi aset pada saat akuisisinya. Sementara biaya historis yang berasal dari liabilitas tergantung pada apakah ada tidaknya ketidakpastian yang terkait dengan jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam hal probabilitas atau ketidakpastian, biaya historis adalah jumlah dari kas atau setara kas yang diharapkan untuk dibayar, atau nilai wajar dari aset lain yang diharapkan untuk didistribusikan, dalam rangka menyelesaikan suatu liabilitas. Jika suatu jumlah yang harus diterima dibayarkan kembali, maka biaya historis adalah jumlah atau hasil dari kas atau setara kas yang diterima, atau nilai wajar dari aset non-tunai yang diterima pada waktu hutang atau kewajiban terjadi.

**Biaya yang Diamortisasi (*Amortized Cost*).** Biaya jenis ini adalah arus kas aktual dari suatu aset atau liabilitas, termasuk arus kas awal dan arus kas berikutnya. Biaya historisnya disesuaikan menurut waktu dari uang, melalui bunga efektif untuk menghasilkan arus kas nilai sekarang.

**Nilai Wajar (*Fair Value*)** adalah jumlah atas mana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas yang diselesaikan antara para pihak dalam transaksi yang wajar (*arm's length transaction*), hal ini menurut IFRS berarti: 1) Berpengetahuan (*knowledgeable*) yang berarti bahwa baik pembeli maupun penjualan berkeinginan diinformasikan dengan baik mengenai sifat dan karakter dari aset, manfaat serta kondisi pasar pada saat aktual; 2) Willing buyer, seorang pembeli berkeinginan dan dipaksa untuk membeli. Begitu juga berlaku untuk *willing seller*; 3) Suatu transaksi yang wajar adalah salah satu pihak dengan pihak lainnya tidak memiliki hubungan khusus yang kemudian menjadikan transaksi sesuai dengan kondisi pasar.

Sebelum dilakukan rekonstruksi terhadap laporan keuangan KPN Polnep, terlebih dahulu ditampilkan kebijakan akuntansi yang digunakan sebelumnya, bahwa KPN Polnep tahun 2010 sampai tahun 2011 menggunakan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 27 Tahun 2007 Tentang Akuntansi Koperasi. Berikut ini adalah konsep dan prinsip KPN Polnep jika dibandingkan dengan IFRS For SMEs (SAK-ETAP).

Prinsip pengakuan dan pengukuran dari standar didasarkan pada prinsip Pervasif (berpengaruh luas) yang berasal dari Kerangka Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk mengadopsi IFRS secara penuh. Berikut ini adalah tabel konsep-konsep yang harus diikuti oleh entitas ETAP sebagai pedoman spesifik dalam pengembangan kebijakan akuntansi:

Tabel 1. menjelaskan bahwa setiap entitas diharapkan memiliki pedoman konsep serta prinsip pervasif yang tujuannya untuk menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas agar bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip prinsip pengakuan dan pengukuran pervasif berasal dari standar pelaporan keuangan

**Tabel 1. Ikhtisar Konsep dan Prinsip Pervasif**

No.	Konsep/Prinsip	Kondisi di KPN Polnep	Keterangan
1	Basis Akrua	Telah Akrua Basis	Sesuai
2	Pengakuan Asset, Liabilitas, Income dan Expenses	Telah ada Pengakuan	Sesuai
3	Pengukuran dengan Biaya Historis, Biaya diamortisasi dan Nilai Wajar	Hanya Biaya Historis dan Amortisasi	Tidak ada kewajiban thp nilai wajar

Sumber: Data diolah

internasional (IFRS) yang lengkap.

Penerapan IFRS secara penuh bagi entitas ETAP merujuk pada tidak disyaratkan dilakukannya retrospektif karena entitas ETAP boleh atau dapat mempertimbangkan konsep definisi, konsep kriteria pengakuan, dan konsep untuk pengakuan aset, liabilitas, income serta expense dan prinsip pervasif yang diterapkan oleh standar.

## DISKUSI

Perubahan PSAK 27 menjadi IFRS For SMEs (SAK-ETAP), PSAK 27 Tahun 1998 Tentang Akuntansi Koperasi mengalami proses revisi dan di format ulang pada tahun 2007. Standar ini merupakan standar keuangan dengan model lama setelah diresmikannya penggunaan IFRS For SMEs (SAK-ETAP) berlaku efektif 1 Januari 2012. PSAK 27 mengatur tentang perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi, pernyataan tersebut mencakup pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan khusus untuk Ekuitas, Asset, Sisa Hasil Usaha, Pendapatan dan Biaya.

Konvergensi merupakan suatu kesepakatan Indonesia dengan negara anggota G20, sebagai dampak perkembangan akuntansi internasional. Terdapat tujuan globalisasi tersebut adalah untuk mencapai *Good Corporate Governance* dengan item transparansi, akuntabilitas, dan globalisasi bahasa pelaporan keuangan.

Dengan adanya konvergensi ke IFRS, maka aturan-aturan yang sudah ada dalam PSAK dan sudah diatur di dalam IFRS maka akan dicabut. Dimana salah satunya adalah PSAK 27 mengenai akuntansi koperasi.

Pencabutan ini sesuai dengan misi konvergensi, yaitu mencabut PSAK yang sudah ada atau diatur dalam IFRS, pencabutan ini bertujuan untuk mendorong koperasi atau entitas sejenis untuk membuat laporan keuangannya lebih transparan, karena berbagai kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM (KKUMKM), dan teknis IAI menunjukkan bahwa hanya 60% koperasi yang aktif melakukan atau menyelenggarakan RAT dari 166 ribu entitas koperasi yang ada di Indonesia. Penyebabnya adalah karena minimnya sumber daya manusia yang kompeten di koperasi tersebut, selain itu juga karena pengurus tidak mampu membuat laporan keuangan.

## Rekonstruksi Laporan Keuangan 2012

Pelaporan keuangan yang disyaratkan dalam Rapat Anggota Tahunan tahun 2013, sesungguhnya KPN Polnep telah berpedoman pada IFRS For SMEs atau SAK ETAP. Tetapi walaupun KPN Polnep telah merasa menggunakan IFRS For SMEs pada pelaporan yang berakhir per 31 Desember 2012, peneliti merasa perlu untuk menelusuri kembali penggunaan IFRS For SMEs (SAK ETAP) tersebut. Berikut ini adalah beberapa temuan yang mengungkapkan bahwa ada beberapa kebijakan atau pos pos yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan

pengungkapan dalam pelaporan KPN Polnep, tertuang dalam Kebijakan akuntansi KPN Polnep bahwa secara umum Laporan keuangan KPN Politeknik Negeri Pontianak disajikan berdasarkan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan khususnya tentang koperasi yang diterapkan secara konsisten, dan KPN Polnep telah menyatakan menggunakan IFRS For SMEs (SAK ETAP).

#### **Perubahan Kebijakan Akuntansi.**

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dicatat sebagai berikut: 1) Yang diakibatkan dari suatu perubahan ketentuan dari standar 2) Semua perubahan lain dalam kebijakan akuntansi adalah retrospektif (berlaku surut) Komentar: Penerapan retrospektif berarti bahwa kebijakan akuntansi yang baru diterapkan pada informasi komparatif, seolah olah kebijakan akuntansi baru tersebut telah lama diterapkan. Suatu pengecualian yang tidak praktis diberikan atas penerapan retrospektif. Bilamana ketidakpraktisan untuk menentukan penga-

ruh periode individual atas perubahan kebijakan akuntansi mengenai informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya, maka kebijakan akuntansi yang baru adalah: diterapkan pada jumlah yang tercatat mengenai aset, liabilitas pada awal periode terawal, untuk penerapan retrospektif yang dapat dipraktikkan. Suatu penyesuaian yang terkait dilakukan terhadap saldo awal masing-masing komponen yang terpengaruh dari ekuitas untuk periode tersebut. Komentar: Tidak harus retrospektif.

#### **Aktivitas Operasi**

Aktivitas operasi adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan utama dari entitas. Asset adalah yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Komentar: Aktivitas operasi KPN Polnep disebut sebagai Aktivitas Usaha, secara SAK ETAP sudah sesuai.

**Tabel 2. Laporan Arus Kas**

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Aktivitas Usaha		
Pendapatan Usaha	851.231.649,96	683.155.931,05
Pendapatan & Beban Lain-Lain	10.218.769,41	22.024.368,61
Penurunan Piutang Anggota	0,00	0,00
Penurunan Piutang Non Anggota	(1.503.650,00)	810.950,00
Penurunan Persediaan Barang Yang Rusak	0,00	0,00
Kenaikan Utang Usaha Toko (Waserda)	(24.093.250,00)	31.102.950,00
Kenaikan Utang Bunga Bank	238.239,58	8.257.021,44
Kenaikan Simpanan Suka Rela	4.836.000,00	4.758.000,00
Total Aktivitas Usaha	<u>840.927.758,95</u>	<u>750.109.221,10</u>

**Tabel 3. Aktivitas investasi**

Kenaikan Nilai Buku Aset Tetap	(32.164.594,41)	8.237.073,75
Kenaikan Nilai Buku Aset Lain-Lain	<u>(277.990.600,00)</u>	<u>321990600,00</u>
Total Aktivitas Investasi	<u>(310.155.194,41)</u>	<u>330.227.673,75</u>

**Tabel 4. Aktivitas Pendanaan**

Penurunan Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pembagian SHU	50.621.764,72	150.922.668,56
Total Aktivitas Pendanaan	50.621.764,72	150.922.668,56

Aktivitas investasi adalah aktivitas pengambilalihan di dalam akusisi dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi lain, yang tidak memenuhi setara kas. Kenaikan nilai buku Asset Tetap dan Asset lain Lain pada laporan arus kas aktivitas investasi KPN Polnep adalah telah sesuai dengan SAK ETAP pada standar pembayaran kas untuk mengakusisi aset tetap dan penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Komentar: Sesuai SAK ETAP. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas yang menimbulkan perubahan dalam besaran atau ukuran dari komposisi ekuitas yang dikontribusikan dan pinjaman dari suatu

entitas. Klasifikasi ini biasanya disebabkan dari mutasi semua akun hutang jangka panjang dan akun ekuitas dari suatu entitas. Komentar: sesuai SAK ETAP

Laporan Arus Kas KPN Polnep pada prinsipnya telah sesuai dengan SAK ETAP namun disarankan agar dimasa yang akan datang, dalam pelaporan Arus Kas KPN Polnep untuk menggunakan metode langsung (*direct method*) atau metode tidak langsung (*indirect method*). SAK ETAP memperbolehkan entitas untuk menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut terutama untuk aktivitas operasi. Berikut ini adalah format laporan arus kas yang digunakan KPN Polnep.

**Tabel 5. Format Laporan Arus Kas**

KOPERASI PEGAWAI NEGERI POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
LAPORAN ARUS KAS  
PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012 DAN 2011  
(dalam rupiah)

<i>LAPORAN C</i>		
	<u>31 Desember 2012</u>	<u>31 Desember 2011</u>
<b>I</b>	<b>SUMBER DANA KAS DAN BANK</b>	
<b>A</b>	<b>Aktivitas Usaha</b>	
	Pendapatan Usaha	851.231.649,96
	Pendapatan & Beban Lain-Lain	10.218.769,41
	Penurunan Piutang Anggota	0,00
	Penurunan Piutang Non Anggota	(1.503.650,00)
	Penurunan Persediaan Barang Yang Rusak	0,00
	Kenaikan Utang Usaha Toko (Waserda)	(24.093.250,00)
	Kenaikan Utang Bunga Bank	238.239,58
	Kenaikan Simpanan Suka Rela	4.836.000,00
	<b>Total Aktivitas Usaha</b>	<b>840.927.758,95</b>
<b>B</b>	<b>Aktivitas Investasi</b>	
	Penurunan Nilai Buku Aktiva Lain-Lain	0,00
	<b>Total Aktivitas Investasi</b>	<b>0,00</b>

<b>C</b>	<b>Aktivitas Pendanaan</b>		
	Kenaikan Utang Jangka Panjang	230.354.003,17	653.039.778,97
	Kenaikan Simpanan Pokok	100.000,00	425.000,00
	Kenaikan Simpanan Wajib	96.480.000,00	95.160.000,00
	<b>Total Aktivitas Pendanaan</b>	<b>326.934.003,17</b>	<b>748.624.778,97</b>
	<b>Total Sumber Dana Kas &amp; Bank</b>	<b>1.167.861.762,12</b>	<b>1.498.734.000,07</b>
<b>II</b>	<b>PENGUNAAN DANA KAS DAN BANK</b>		
<b>A</b>	<b>Aktivitas Usaha</b>		
	Harga Pokok Penjualan	473.906.150,00	327.181.952,00
	Beban Usaha	285.904.806,66	281.575.938,66
	Kenaikan Piutang Anggota	574.874.844,45	210.166.843,94
	Kenaikan Persediaan Barang	9.431.900,00	23.010.198,00
	Kenaikan Persediaan Barang Yang Rusak	38.850,00	327850,00
	Penurunan Utang Bunga Bank	0,00	0,00
	Penurunan Dana Cadangan	(14.221.764,73)	2.555.728,55
	<b>Total Aktivitas Usaha</b>	<b>1.329.934.786,38</b>	<b>844.818.511,15</b>
<b>B</b>	<b>Aktivitas Investasi</b>		
	Kenaikan Nilai Buku Aset Tetap	(32.164.594,41)	8.237.073,75
	Kenaikan Nilai Buku Aset Lain-Lain	(277.990.600,00)	321990600,00
	<b>Total Aktivitas Investasi</b>	<b>(310.155.194,41)</b>	<b>330.227.673,75</b>
<b>C</b>	<b>Aktivitas Pendanaan</b>		
	Penurunan Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
	Pembagian SHU	50.621.764,72	150.922.668,56
	<b>Total Aktivitas Pendanaan</b>	<b>50.621.764,72</b>	<b>150.922.668,56</b>
	<b>Total Penggunaan Dana Kas &amp; Bank</b>	<b>1.070.401.356,70</b>	<b>1.325.968.853,46</b>
	<b>Kenaikan (Penurunan) Dana Kas &amp; Bank (1-2)</b>	<b>97.460.405,42</b>	<b>172.765.146,61</b>
	Kas & Bank Awal Periode	212.734.118,07	39.968.971,46
	<b>Kas &amp; Bank Akhir Periode</b>	<b>310.194.523,49</b>	<b>212.734.118,07</b>

Laporan arus kas KPN Polnep menggunakan pemisahan antara sumber dan penggunaan terhadap dana kas sedangkan SAK ETAP menginginkan adanya pemakaian suatu metode.

### Solusi SAK ETAP

Contoh: Penggunaan Metode Langsung  
 Arus Kas dari Aktivitas Operasi  
 Penerimaan Kas dari pelanggan xxxx  
 Kas dibayarkan ke pemasok (xxxx)

Kas yang dihasilkan dari operasi	xxxx
Pajak	(xxxx)
SHU dibayarkan	xxxx
Penghasilan Lain-lain	xxxx
Arus kas dari operasi lain lain	xxxx
Arus Kas Netto dari aktivitas operasi	xxxx

### Persediaan Barang

Saldo persediaan barang per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut



**Tabel 6. Persediaan Barang**

	2012	2011
Persediaan barang unit Toko	25.583.000,00	28.529.100,00
Persediaan barang unit Foto copy	34.650.000,00	22.272.000,00
Persediaan barang Barang Dagangan yang rusak	980.800,00	448.900,00
Persediaan kertas yang rusak	1.168.650,00	1.661.700,00
Saldo persediaan barang	<b>62.382.450,00</b>	<b>52.911.700,00</b>

**Persediaan (Inventory).** Penilaian terhadap persediaan barang dilakukan berdasarkan taksiran dengan metode Eceran.

Tidak ada masalah dalam penggunaan metode eceran yang digunakan oleh KPN Polnep, karena menurut SAK-ETAP Persediaan: (1) Belum ada penjelasan tentang provisi atas keusangan/kerusakan dalam persediaan; (2) Persediaan harus diukur dengan memperhitungkan bahwa koperasi adalah penyedia jasa, sehingga persediaan harus diukur berdasarkan biaya produksi; dan (3) Munculnya biaya langsung terutama dari gaji, dan upah staf/adm yang langsung dikategorikan sebagai Biaya persediaan

Komentar: Oleh karena SAK ETAP menyatakan mengijinkan metode Eceran sebagai teknik lain yang boleh digunakan. Metode Eceran adalah metode yang mengkalkulasi biaya perolehan persediaan dengan menyesuaikan harga jual dengan persentase margin kotor yang tepat. Harga yang paling akhir dari pembelian menggunakan harga pembelian terakhir dari pos persediaan. Namun diharapkan dimasa yang akan datang KPN Polnep dapat menggunakan metode penilaian persediaan dengan menggunakan metode yang lebih andal yaitu: Metode Biaya aktual atau Metode Biaya Standar.

### **Liabilitas**

Setiap liabilitas yang merupakan suatu kewajiban kontraktual untuk: (1) Menyerahkan kas atau aset keuangan lain

kepada entitas lain; atau (2) Menukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain menurut kondisi yang secara potensial tidak menguntungkan bagi entitas; atau (3) Suatu kontrak yang akan atau dapat diselesaikan di dalam instrumen ekuitas milik entitas; dan (4) Menurut entitas adalah atau dapat diwajibkan untuk menyampaikan sejumlah varabel dari instrumen ekuitas milik entitas.

Akan atau dapat diselesaikan selain daripada pertukaran sejumlah kas yang ditetapkan atau aset keuangan lainnya untuk sejumlah instrumen ekuitas milik entitas yang ditetapkan. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas milik entitas tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak atas penerimaan masa depan. Komentar : tidak ada

### **Ekuitas**

Saldo kekayaan bersih per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut.

Kriteria klasifikasi ekuitas anggapan menyatakan bahwa beberapa instrumen keuangan yang memenuhi definisi dari suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai ekuitas, karena mewakili kepentingan residual dalam aset netto dari entitas.

### **Kewajiban Lancar**

Saldo kewajiban lancar untuk 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7. Kewajiban Lancar**

Utang Usaha Toko (Waserda)		14.550.300,00	38.643.550,00
Utang Bunga Bank		17.610.759,51	17.372.519,93
Simpanan Sukarela		30.094.402,00	25.258.402,00
Sewa yang diterima dimuka terdiri dari :			
- Sutrisno berakhir 19 Maret 2012	Rp	1.000.125,00	
- Oscar R berakhir 19 Maret 2012	Rp	1.000.125,00	
- Masril berakhir 19 Maret 2012	Rp	1.000.125,00	
- Nizar berakhir 1 Desember 2012	Rp	3.667.125,00	
- Hadi S berakhir 1 Desember 2012	Rp	3.667.125,00	
<b>Saldo Sewa yang diterima dimuka</b>		<b>10.334.625,00</b>	<b>10.334.625,00</b>
<b>Total kewajiban lancar</b>		<b>72.590.086,51</b>	<b>91.609.096,93</b>

Perincian Kewajiban Lancar Masing-Masing dapat dilihat pada lampiran 6, 7, dan 8.a s/d 8.g

**Kewajiban Jangka Panjang**

Saldo kewajiban Jangka Panjang untuk 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

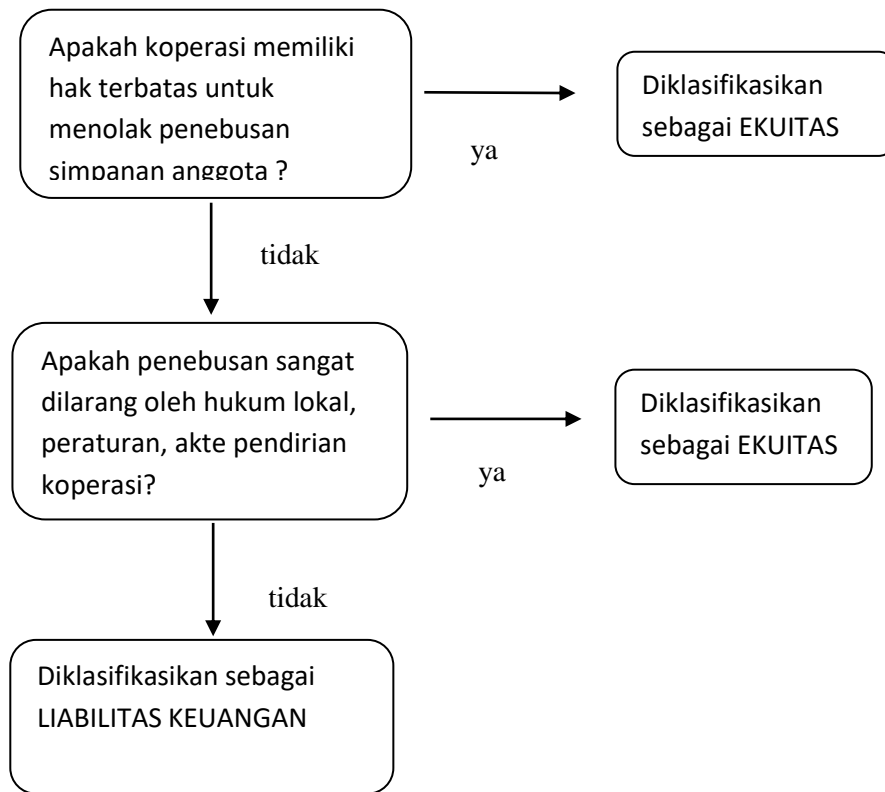
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
PT Bank Syariah Mandiri (BSM)	15.255.167,13	248.533.333,33
Permodalan Nasional Madani (PNM)	-	38.888.888,89
PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)	0,00	-
PT Bank Negara Indonesia (BNI) 1946	1.391.409.947,15	888888888,89
<b>Total Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>1.406.665.114,28</b>	<b>1.176.311.111,11</b>

**Tabel 8. Saldo kekayaan bersih per 31 Desember 2012 dan 2011**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Simpanan Pokok	10.025.000,00	9.925.000,00
Simpanan Wajib	534.416.250,00	437.936.250,00
Dana Cadangan	36.114.709,86	21.892.945,13
SHU Tahun Berjalan	101.639.462,71	96.422.409,00
SHU Tahun Lalu (Sisa)	45.800.644,28	-
<b>Saldo Kekayaan Bersih</b>	<b>727.996.066,84</b>	<b>566.176.604,13</b>

Komentar: Bagian dari anggota dalam entitas Koperasi SAK ETAP menyatakan bahwa saham pemilik (simpanan pokok dan simpanan wajib) pada entitas koperasi dan instrumen sejenisnya hanya diklasifikasikan sebagai ekuitas jika: 1) Entitas mempunyai suatu hak tidak terbatas untuk menolak penebusan saham anggota 2) Penebusan

instrumen sangat dilarang oleh hukum setempat, peraturan atau konstitusi milik entitas. Jika entitas tidak dapat menolak penebusan, maka saham anggota diklasifikasikan sebagai liabilitas. Klasifikasi kepemilikan anggota dalam entitas koperasi, sebagai ekuitas maupun sebagai liabilitas ditentukan sebagai berikut.



**Gambar 1. Skema Klasifikasi Liabilitas dan Ekuitas Koperasi Berdasarkan SAK ETAP**

**Tabel 9. Penjualan dan Pendapatan**

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
<b>Penjualan dan Pendapatan</b>		
Hasil Penjualan Unit Toko & Foto Copy	554.664.050,00	362.788.266,65
Pendapatan Jasa Unit Simpan Pinjam	276.565.099,96	250.365.164,40
Pendapatan Sewa Unit Kantin	20.002.500,00	20.002.500,00
Pendapatan Tender Proyek	-	50.000.000,00
<b>Total Penjualan dan Pendapatan</b>	<b>851.231.649,96</b>	<b>683.155.931,05</b>

Komentar: Dengan demikian harus ada kejelasan dari KPN Polnep dalam mengklasifikasikan antara ekuitas (keayaan bersih) dan liabilitas (kewajiban).

#### **Sewa**

KPN Polnep sudah tepat menempatkan Pendapatan usaha penyewaan kantin pada pos Pendapatan, dimana KPN Polnep selaku Lessor (pihak yang menyewakan) tetap mengakui aset yang disewa pada laporan posisi keuangan dengan nama Bangunan serta mende-

presiasikan aset tersebut serta mengakuinya sebagai pendapatan sewa pada laporan SHU Komprehensif. Komentar: Pendapatan usaha penyewaan kantin milik KPN Polnep harus diakui/ harus dipertegas pengakuannya sebagai **Sewa Guna Usaha Operasi**.

#### **Pendapatan**

Pendapatan diakui sebagai hak pada saat transaksi diakui terjadi, dan dibukukan ketika bukti transaksi selesai atau siap dibuat, meskipun pembayaran diterima dimuka (di kemudian hari). Metode

pengakuan pendapatan dan biaya dilakukan berdasarkan *accrual basic*. Penjualan dan Pendapatan, Penjualan dan pendapatan KPN Polnep terdiri dari: Unit Toko dan Foto Copy, Unit Simpan Pinjam, Pendapatan Penyewaan Kantin, Pendapatan Pengadaan Barang dan Jasa.

Rekomendasi SAK-ETAP: (1) Pendapatan diukur pada nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto; (2) Nilai yang menjadi bagian pihak ketiga harus dikeluarkan sebagai pendapatan; (3) Jasa keagenan hanya diakui sebesar nilai komisi keagenan saja, jumlah yang diperoleh atas nama prinsipal bukan merupakan pendapatan koperasi; dan (4) Pembayaran tangguhan maka pendapatan diakui sebesar nilai tunai (nilai wajar), dan selisih diakui sebagai pendapatan bunga.

#### **Pendapatan dari penjualan barang (unit toko dan fotocopy)**

Pendapatan dari penjualan barang dapat diakui koperasi jika semua kondisi berikut terpenuhi. (1) Koperasi telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. (2) Jumlah penjualan dapat diukur secara andal. (3) Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Komentar: Untuk pendapatan dalam bentuk hasil penjualan unit toko & Fotocopy, pendapatan jasa simpan pinjam serta pendapatan sewa unit kantin TIDAK memerlukan pengungkapan lebih lanjut. Tetapi untuk Pendapatan Tender Proyek dalam tahun 2011 ke 2012 Belum Ada Pengungkapan.

Pengungkapan yang seharusnya dilakukan untuk pendapatan tender/proyek menurut standar SAK ETAP adalah: (1) Jumlah pendapatan tender/proyek yang diakui sebagai pendapatan di dalam periode; dan (2) Mencantumkan metode

yang digunakan dalam pendapatan tender / proyek tersebut dengan metode penyelesaian kontrak dalam proses. Menagih jumlah tagihan bruto kepada pelanggan atas kerja kontak sebagai suatu asset. (dalam hal ini Piutang Anggota).

#### **Transisi ke SAK ETAP**

Aturan transisi diterapkan kepada pengadopsian pertama kali pada SAK ETAP, didefinisikan sebagai suatu entitas yang menyajikan laporan keuangan tahunan pertama kali yang sesuai dengan Sak ETAP, tanpa memandang apakah kerangka akuntansi sebelumnya menganut IFRS lengkap atau kerangka akuntansi lainnya. Tanggal transisi Sak ETAP didefinisikan sebagai awal dari periode terkini saat entitas menyajikan informasi komparatif sepenuhnya menurut SAK ETAP. Biasanya hal ini dilakukan pada awal periode komparatif, tetapi Sak ETAP memperbolehkan informasi disajikan lebih dari satu tahun komparatif.

Tanggal transisi adalah awal periode terkini saat laporan komparatif disajikan. Hal ini biasanya 2 tahun sebelum tanggal pelaporan dengan asumsi laporan komparatif satu tahun disajikan, dan periode yang disajikan adalah 12 bulan. Komentar: KPN Polnep cukup menegaskan penggunaan SAK ETAP secara kalimat dalam kebijakan akuntansinya, terutama pada catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi (Rekonstruksi) untuk disesuaikan dengan IFRS For SMEs (SAK-ETAP). Dibuatlah rekapitulasi terhadap Laporan Keuangan Tahun 2012 yang menggambarkan keseluruhan konstruksi terhadap rekening rekening yang terdeteksi mengalami ketidaksesuaian dengan standar. Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan hasil penelitian terhadap model yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Negeri Politeknik Negeri Pontianak.

**Tabel 10. Rekapitulasi Rekonstruksi Laporan Keuangan 2012 KPN Polnep**

No.	Temuan dalam Laporan Keuangan KPN POLNEP	Solusi Rekonstruksi	Keterangan
1	Telah ada pernyataan digunakannya SAK ETAP, namun hanya pengantar laporan pertanggungjawaban	Wajib menyatakan menggunakan SAK ETAP di CALK	Pada Kebijakan Akuntansi
2	Telah berubah ke SAK ETAP, namun belum menyeluruh	Retrospektif	Tidak Wajib Retrospektif
3	Hanya menggunakan komposisi Sumber dan Penggunaan dana kas	Memilih metode langsung atau tidak langsung	Pada Laporan Arus Kas
4	Metode Eceran	Metode biaya aktual atau Metode biaya standar	Pada Penilaian Persediaan
5	Masih menggunakan SK Menteri Keuangan No. 961/KMK-84/1983 (metode garis lurus)	Memilih metode garis lurus, metode saldo menurun atau metode unit produksi	Pada Depresiasi Asset Tetap
6	Telah ada klasifikasi yang jelas antara Liabilitas dan Ekuitas	Pemisahan yang jelas antara Liabilitas dan Ekuitas dengan Pengungkapan	Pada Liabilitas dan Ekuitas
7	Belum merujuk pada Sewa Guna Usaha Operasi	Klasifikasi sebagai Sewa Guna Usaha Operasi	Pada Pendapatan Sewa Kantin
8	Belum ada pengungkapan tender/proyek	Harus dilakukan pengungkapan	Pada Pendapatan Tender/Proyek
9	Telah berpedoman pada SAK ETAP	Transisi ke SAK ETAP secara penuh (full)	

Sumber : Data Olahan

Tabel tersebut di atas menjelaskan, terdapat sembilan item temuan atas penggunaan IFRS For SMEs atau SAK ETAP yang digunakan oleh KPN Polnep pada tahun buku per 31 Desember 2012. Pada akhirnya, terdapat ketidaksempurnaan penerapan IFRS For SMEs atau SAK ETAP pada KPN polnep. Unsur unsur tersebut diatas adalah membandingkan secara konseptual antara standar SAK ETAP dengan yang dilaporkan dalam laporan keuangan KPN Politeknik Negeri Pontianak.

Tanggung jawab Sosial Koperasi Pegawai Negeri Politeknik Negeri Pontianak dengan adanya perubahan model menjadi IFRS For SMEs (SAK-ETAP). Koperasi Pegawai Negeri Politeknik Negeri

Pontianak telah menggunakan IFRS For SMEs (SAK ETAP) pada tahun buku 31 Desember 2012, yang berarti secara tujuan laporan keuangan yang terdapat dalam pedoman SAK ETAP telah memenuhi kepatuhan terhadap standar tersebut. Oleh karena itu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Politeknik Negeri Pontianak dapat disebutkan telah bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Dalam hal ini adalah kepada anggota koperasi KPN Politeknik Negeri Pontianak.

Tanggung jawab sosial dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Politeknik Negeri Pontianak telah tercermin dari: (1) Selalu mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dan tepat waktu. (2) Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada

anggota koperasi. (3) Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara rutin setiap tahun. (4) Program koperasi simpan pinjam milik KPN Polnep telah membantu anggota koperasi menjadi lebih sejahtera.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta memperhatikan kesesuaian dengan kerangka teori maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Sejak PSAK 27 Tahun 2007 dicabut berdasarkan surat resmi Ikatan Akuntan Indonesia, ED PPSAK No. 8 dimana surat pencabutan ini dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2010 dan pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. (2) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Politeknik Negeri Pontianak telah menggunakan IFRS For SMEs (SAK ETAP) pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012. Ini berarti KPN Polnep sudah melakukan perubahan, namun berdasarkan hasil penelitian, walaupun telah berpedoman pada IFRS For SMEs (SAK ETAP), pada beberapa bagian berikut ini masih belum patuh pada standar tersebut antara lain : (a) Pernyataan KPN Polnep tentang penggunaan kebijakan akuntansinya yang berpedoman pada IFRS For SMEs (SAK ETAP) belum tertulis secara jelas pada Catatan Atas Laporan Keuangan. (b) Belum memilih metode biaya akrual atau metode biaya standar pada pengukuran persediaan (c) Belum memilih metode langsung atau metode tidak langsung dalam melaporkan laporan arus kas. (d) Masih menggunakan SK Menteri Keuangan No. 961/KMK-84/1983 dalam pengukuran depresiasi dengan garis lurus. (e) Belum ada pengungkapan terhadap Pendapatan Tender/proyek (f) Belum ada penegasan terhadap pos sewa sebagai sewa guna usaha (g) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Politeknik Negeri Pontianak tidak

diwajibkan retrospektif terhadap laporan keuangannya. (h) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Politeknik Negeri Pontianak telah menggunakan IFRS For SMEs atau SAK ETAP sebagai pedoman dalam melaporkan laporan keuangannya adalah sama artinya dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Politeknik Negeri Pontianak telah memenuhi kepatuhan terhadap Tujuan Laporan Keuangan SAK ETAP dari unsur Pertanggungjawaban Manajemen (i) Jika dikemudian hari KPN Polnep menaikkan iuran anggota (simpanan pokok atau simpanan wajib ) maka KPN polnep wajib menjelaskannya dalam bagian Ekuitas (j) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Politeknik Negeri Pontianak telah cukup baik dalam hal tanggung jawab manajemen terhadap lingkungannya dengan cara mempublikasikan laporan keuangannya setiap Rapat Anggota Tahunan serta tanggung jawab dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha.

## Saran

Memperhatikan kelemahan yang terdapat pada kesimpulan dan keseluruhan unsur penelitian ini maka terdapat beberapa saran untuk Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Politeknik Negeri Pontianak : (1) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Politeknik Negeri Pontianak dapat menerapkan IFRS For SMEs (SAK ETAP) secara penuh (full) untuk tahun selanjutnya. (2) Mengganti istilah Neraca dengan Laporan Posisi Keuangan pada laporan keuangan tahun buku berikutnya. (3) Merubah tampilan atau format Laporan Posisi Keuangannya dengan menyajikan asset tetap terlebih dahulu untuk kemudian asset lancar pada tahun buku berikutnya. (4) Memperbesar ekuitas yang berasal dari anggota sehingga pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota koperasi semakin bertambah.

## Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan antara lain: 1) Penelitian hanya

dilakukan pada satu koperasi sehingga yang menjadi objek dirasa masih kurang. 2) Karena SAK ETAP merupakan pembaharuan terhadap kebijakan yang baru sehingga perlu disosialisasikan kepada koperasi maupun UKM. 3) Masih banyak koperasi dan UKM yang belum mengenal bentuk SAK Etap sehingga mereka merasa takut dalam melaporkan usahanya dalam bentuk laporan keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrory, Agnesti Rizky. 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan SAK bagi UKM*, UGM Yogyakarta: Skripsi.
- Brigham, Eugene F & Joel R. Huston. 2001. *Manajemen Keuangan*. Buku I. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga
- Brealey, R., Myers. S., 1991, *Principle Of Corporate Finance*, Mc Graw Hill: New Jersey
- Eriyanto, Dwi. 2012. *IFRS, Modul Pelatihan IFRS*, Jakarta: PT Proesdeem Indonesia Utama
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- IAI.2010. ED PPSAK 8 *Pencabutan PSAK No. 27 Akuntansi Koperasi*.IAI
- Kieso, Donald E. Weygandt. 2004. *Intermediate Accounting*. 11 edition. John Wiley & Sons. Inc
- Lestari, Yunie Indah. 2007. *Standarisasi Sistem Pelaporan Keuangan Pada UKM Usaha Kripik Pisang di Kabupaten Lumajang*. Universitas Merdeka: Skripsi. Akuntansi Indonesia.
- Mackenzie, Bruce. 2012. *IFRS For SMEs Untuk Usaha Kecil Menengah Atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Terjemahan Priyo Darmawan. Jakarta: Indeks.
- Manda, Kurnia. 2012. *Analisa Kinerja Keuangan Pada KPN Polnep*. Politeknik Negeri Pontianak: Tugas Akhir.
- PSAK No. 27. 2007. *Tentang Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Strawser, Jefry. and Strawser, Joyce. 2001. *Financial Accounting and Reporting*. Thomson Learning.
- Uma, Sekaran. 2000. *Research Methods For Business: a Skill Building Approach*. 3<sup>th</sup> Edition. Singapore: John Willey & Son.
- UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 dan 5.
- Warsono, Sony. 2010. *Akuntansi Untuk UKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*. Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Wirahardja, Roy Iman. 2010. *Adopsi IAS 41 dalam rangkaian konvergensi IFRS di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.